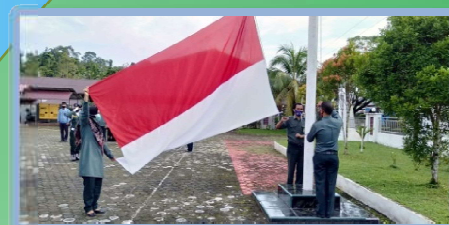


LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI SINABANG

2021



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jalan Tgk Diujung No. 406 Sinabang – Kabupaten Simeulue – Provinsi Aceh 23891

Telpun (0650)-21043, 21042 Faximile (0650) - 21043

Website : www.pn-sinabang.go.id

E-mail : pnsinabang@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR



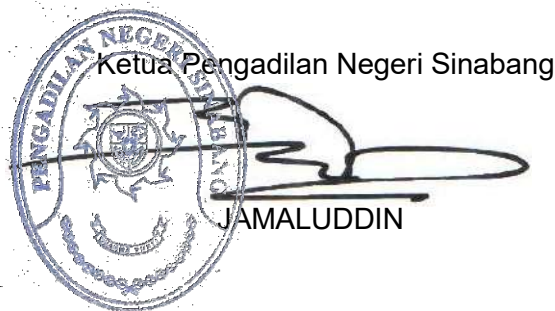
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini adalah sebagai tolak ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban serta implementasi terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam laporan Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjawab berbagai kritikan masyarakat terhadap kinerja pengadilan sebagai lembaga penegak hukum.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sinabang Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu tahun anggaran pada tahun 2021.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik di bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Pelaksana Kegiatan Tahunan 2021 ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



JAMALUDDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERAKRA DI PERADILAN UMUM.....	4
A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA	4
B. PENYELESAIAN PERKARA.	5
- JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS	5
- JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	6
- JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.....	6
- JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI	7
- JUMLAH PERKARA ANAK YANG BEHASIL MELALUI DIVERSI	7
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN).	8
- POSBAKUM	10
- PELAYANAN TERPADU	11
- PERKARA PRODEO.....	12
BAB. III SUMBER DAYA MANUSIA	13
- MUTASI	17
- PROMOSI :.....	18
- Pensiun :	18
- DIKLAT	18
BAB . V PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	21
A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	21
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	22
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	25

- Implementasi E-court di Lingkungan Peradilan Umum.	25
- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.	26
Bab. V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	29
- Akreditasi Penjaminan Mutu.	29
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).	29
- Inovasi Pelayanan Publik.	30
BAB VI PENGAWASAN.	33
A. INTERNAL.	33
B. EVALUASI.	36
BAB. VII PENUTUP	37
A. KESIMPULAN	37
B. REKOMENDASI	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Sinabang adalah Pengadilan Tingkat Pertama di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan ditingkat pertama. Dengan semangat reformasi dan birokrasi yang terus bergulir peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan titik utama penyelenggaraan layanan peradilan saat ini.

Hal tersebut selaras dengan visi Pengadilan Negeri Sinabang yaitu “Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang Yang Agung”, visi tersebut dapat tercapai bila Pengadilan Negeri Sinabang dapat mewujudkan tujuan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sinabang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Guna mencapai tujuan tersebut Pengadilan Negeri Sinabang harus menetapkan rencana strategis tahun 2020 - 2024, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam usaha untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi 5 (lima) tahun kedepan, Pengadilan Negeri Sinabang mencanangkan Program Jangka Menengah yang merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dalam *Blue Print* Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Adapun program kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Peningkatan Pelayanan Publik terhadap pencari keadilan dan Masyarakat Umum.
7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern.

Selain hal diatas sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI dalam agenda pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Sinabang dengan sumber daya manusia yang ada, Pengadilan Negeri Sinabang berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, mewujudkan cita-cita pembaharuan badan peradilan dan mewujudkan Pengadilan Yang Agung (*Court of Excellence*). Komitmen memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dituangkan dalam program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

- a. Website Pengadilan Negeri Sinabang

Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/II/2011 maka pada Pengadilan Negeri Sinabang juga telah membuat website PN Sinabang dengan alamat : www.pn-sinabang.go.id dimana website tersebut memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara aktual dan akurat.

- b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP di Pengadilan Negeri Sinabang juga telah disinkronisasikan dengan website Pengadilan Negeri Sinabang sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang berjalan secara langsung. Aplikasi SIPP tersebut dapat langsung diakses di <https://sipp.pn-sinabang.go.id/>

2. Program Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2021 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sinabang terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sinabang pada Tahun 2021 Ketua Pengadilan Negeri Sinabang mengeluarkan kebijakan yaitu:

- a. Mengimplementasikan “One Day Minutation” sebagai langkah agar prosentase SIPP Pengadilan Negeri Sinabang meningkat.
 - b. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.
 - c. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court calendar.

- d. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
- e. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (e-Court) E-court Mahkamah Agung adalah suatu aplikasi dari Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk mendaftarkan perkara hingga persidangan secara online. Keunggulan dari e-court adalah adanya fasilitas e-filing (pendaftaran secara online), e-payment (pembayaran perkara secara online), e-summon (pemanggilan secara online) dan e-litigasi (persidangan secara online).
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.

3. Pengawasan Rutin / Reguler

Pengadilan Negeri Sinabang terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

BAB II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA.

Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Sinabang memiliki tugas pokok :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang meliputi wilayah seluruh Kabupaten Simeulue dengan luas wilayah kurang lebih 2051 km² yang terdiri dari 10 kecamatan sebagai berikut,

1. Kecamatan Simeulue Timur.
2. Kecamatan Simeulue Tengah.
3. Kecamatan Simeulue Barat.
4. Kecamatan Teupah Barat.
5. Kecamatan Teupah Selatan.
6. Kecamatan Teupah Tengah.
7. Kecamatan Teluk Dalam.
8. Kecamatan Alafan.
9. Kecamatan Salang.
10. Kecamatan Simeulue Cut

Dengan wilayah hukum yang terdiri kepulauan menjadi tantangan tersendiri terhadap penyelenggaraan peradilan di kabupaten Simeulue.

Berikut disajikan data Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang periode januari – desember 2021 :

Tabel 1 : Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Sinabang 2021

No	Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Perkara
A	Perkara Pidana				
	Pidana Biasa	1	59	55	5
	Pidana Singkat	0	0	0	0

	Pidana Cepat	0	1	1	0
	Lalu lintas	0	508	508	0
	Pidana Anak	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	2	2	0
B	Perkara Perdata				
	Perdata Gugatan	2	4	5	1
	Perdata Permohonan	0	21	21	0
	Gugatan Sederhana	0	3	2	1
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	2	1	1

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang.

B. PENYELESAIAN PERKARA.

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa Perkara tahun 2020, telah diputus pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 : Sisa Perkara Pengadilan Negeri Sinabang yang diputus tahun 2021

No	Perkara	Sisa Tahun 2020	Di Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
A	Perkara Pidana			
	Pidana Biasa	1	1	0
	Pidana Singkat	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0
B	Perkara Perdata			
	Perdata Gugatan	2	2	0
	Perdata Permohonan	0	0	0
	Gugatan Sederhana	0	0	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0
	Jumlah	3	3	0

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang.

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Seluruh perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2021 dapat diputus tepat waktu. Jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Sinabang Yang Diputus tepat waktu
Tahun 2021**

No	Perkara	Jumlah perkara yang diputus tahun 2021	Putus Tahun 2021 (Tepat waktu)	Putus Tahun 2021 (Tidak tepat waktu)
A	Perkara Pidana			
	Pidana Biasa	55	55	0
	Pidana Singkat	0	0	0
	Pidana Cepat	1	1	0
	Lalu lintas	508	508	0
	Pidana Anak	0	0	0
	Pidana Praperadilan	2	2	0
B	Perkara Perdata			
	Perdata Gugatan	5	5	0
	Perdata Permohonan	21	21	0
	Gugatan Sederhana	3	1	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	1	1	0

Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Sinabang yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2021.

Tabel : Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Sinabang Yang Tidak Melakukan Upaya Hukum Tahun 2021

NO	Jenis perkara	Perkara Putus Tingkat Pertama	Banding		Kasasi		PK	
			ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
1.	Pidana Biasa	59	11	48	8	51	0	59
2.	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0	0
2.	Perdata	7	1	6	1	6	0	7
Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang								

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri sinabang yang berhasil di mediasi pada tahun 2021.

Tabel : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2021

No	Jumlah Perkara Perdata Masuk	Jumlah Perkara Yang di Mediasi	
		Berhasil	Gagal
1.	6	1	5
Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang			

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BEHASIL MELALUI DIVERSI

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Sinabang masuk dalam proses persidangan pada tahun 2021.

Tabel : Jumlah Perkara Anak Tahun 2021

NO	Perkara anak yang masuk	Diversi	Berhasil	Gagal	Ket.
1	0	0	0	0	Tidak ada perkara
Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang					

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN).

Menurut Komite Akreditasi Nasional (KAN) : Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.

Kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu institusi berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan tertentu

Ruang lingkup dari sistem manajemen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum mencakup :

- Penerimaan permohonan Akreditasi
- Perencanaan Asesmen dan Akreditasi
- Penerimaan dokumen, evaluasi dokumen, rekomendasi dokumen
- Pelaksanaan Asesmen
- Laporan Asesmen
- Pengambilan Keputusan Akreditasi
- Pengawasan (*Surveilan*).

Ruang lingkup implementasi sistem untuk Pengadilan Negeri meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit pada Pengadilan Negeri meliputi:

- Manajemen peradilan.
- Administrasi perkara.
- Administrasi persidangan.
- Administrasi umum.
- Pelayanan publik.
- Pengelolaan kas.
- Pengadaan barang dan jasa.
- Pengawasan.
- Penanganan pengaduan.

Unit di Pengadilan Negeri yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

- Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
- Hakim/ Majelis Hakim
- Panitera
- Sekretaris
- Kepaniteraan, yang terdiri:
 - Panitera Muda Perdata
 - Panitera Muda Pidana
 - Panitera Muda Hukum
 - Panitera Pengganti
- Jurusita
- Kesekretariatan, yang terdiri:
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
 - Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*)

Pengadilan Negeri Sinabang telah terakreditasi dengan penilaian A (excellent) pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Sinabang berkomitmen untuk tetap menjaga akreditasi tersebut dengan meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan.



- **POSBAKUM**

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor Pengadilan Negeri Sinabang.

Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu, Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
3. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
5. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Sinabang Memperoleh anggaran pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan lamanya jam layanan 192 (seratus sembilan puluh dua) jam layanan, berikut data pelaksanaan Pos bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sinabang :

Tabel : Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2021.

No	Triwulan	Realisasi Jam Layanan	Jumlah Masyarakat yang Menerima Layanan	Nama organisasi Pemberi Jasa	Keterangan
1	I	48	9	LKBH Simeulue	
2	II	48	10	LKBH Simeulue	
3	III	48	23	LKBH Simeulue	
4	IV	48	13	LKBH Simeulue	
Jumlah		192	55		
Sumber data : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sinabang					

- **PELAYANAN TERPADU**

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai wujud Program Pengadilan Negeri Sinabang Kelas II dalam Rangka membangun wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Dengan adanya System Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan pencari Keadilan dan pengguna layanan Pengadilan dapat dilayani dengan cepat dan maksimal dan Transparan.



Jumlah Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Sinabang							
Selama Tahun 2021							
NO	SATKER	Total Jumlah Layanan yang diberikan (Orang)	Nama Layanan				
			Layanan Pidana (Orang)	Layanan Perdata (Orang)	Layanan Tipikor (Orang)	Layanan Hukum (Orang)	Layanan Umum (Orang)
1	PN Sinabang	173	59	29	-	85	-
Sumber data : layanan PTSP Pengadilan Negeri Sinabang .							

- **PERKARA PRODEO**

Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim, Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas, Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
4. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:

- a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
- b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
- c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.

- d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
- e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses. **Pada tahun 2021 Tidak tersedia Anggaran guna penyelesaian perkara secara Prodeo.**

BAB. III SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai Instansi pemerintah yang memberi Pelayanan Publik di bidang peradilan, Kualitas Pelayanan dan kinerja sangat diutamakan, kualitas pelayanan dan kinerja ditentukan dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya. Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan, demikian juga dengan kuantitas pelaksananya juga perlu dipenuhi.

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Pengadilan Negeri Sinabang dapat kami tampilkan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel : Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan
1.	Jamaluddin, SH.,MH	Wakil Ketua	Pembina Tk. I (IV/b)	S2
2.	Alfan Perdana, SH	Hakim	Penata TK. I (III/d)	S1
3.	M. Novansyah Merta, SH., M.Kn	Hakim	Penata Muda TK I(III/b)	S2
4.	Muhammad Aditia, SH.	Hakim	Penata Muda (III/a)	S1
5.	Ahmad Galih Pratama, S.H	Hakim	Penata Muda (III/a)	S1
6.	Rezki Fauzi, SH	Hakim	Penata Muda (III/a)	S1
7.	Ayon Aurifan, SH	Panitera	Penata (III/c)	S1
8.	Andi Pranoto, SH	Sekretaris	Penata Muda TK. I (III/b)	S1
9.	Indra Jaya Kusumah, SH	Panmud Perdata	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1
10.	Putri Mawar, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk. (III/b)	S1
11.	Safliin	Staf pelaksana Kepaniteraan Muda Perdata	Penata Muda (III/a)	SLTA
12.	Muliadi,, A.Md	Staf Pelaksana Kepaniteraan	Penata Muda (III/a)	DIII

		Muda pidana		
13.	Wahyu Santosa, SE	Staf Pelaksana sub bagian kepegawain ortala	Penata Muda (III/a)	S1
14.	Mitra Permana, A.Md	Staf Pelaksana Kepaniteraan Muda Hukum	Pengatur Tk. I (II/d)	DIII
15.	Roni	Panitera Pengganti	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SMA
16.	Tiara Cindy. A. Md	Jurusita Pengganti	Pengatur (II/c)	DIII
Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.				

Dari data diatas terdapat jabatan yang kosong dibagain Kepaniteran terdiri :

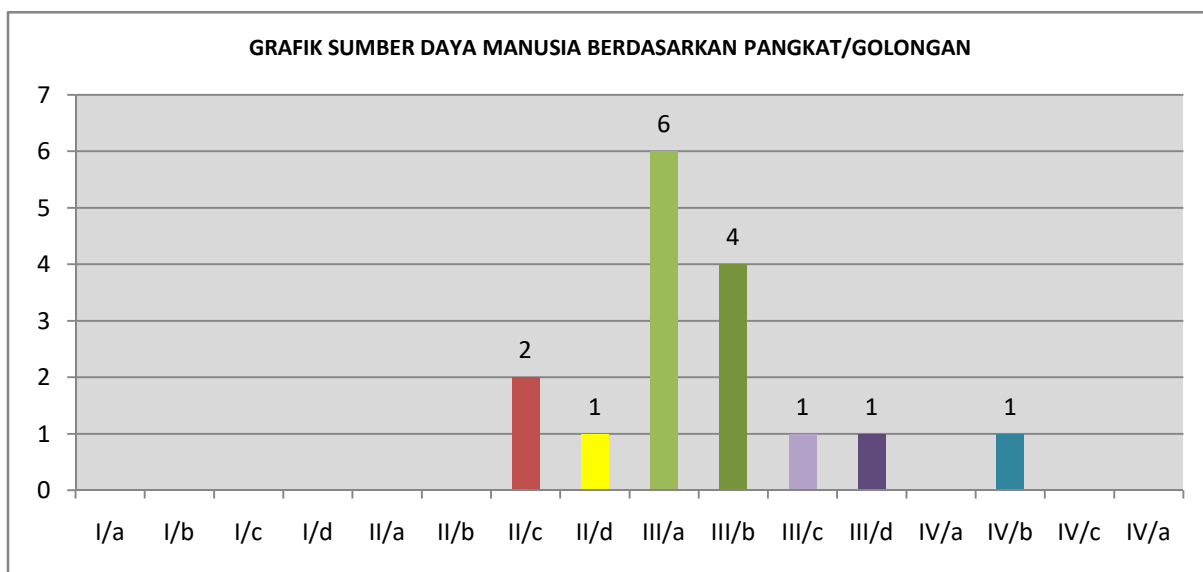
1. Kepaniteraan Muda Pidana.
2. Kepaniteraan Muda Hukum.

Pada bagian kesekretariatan jabatan yang koson terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.
2. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut :

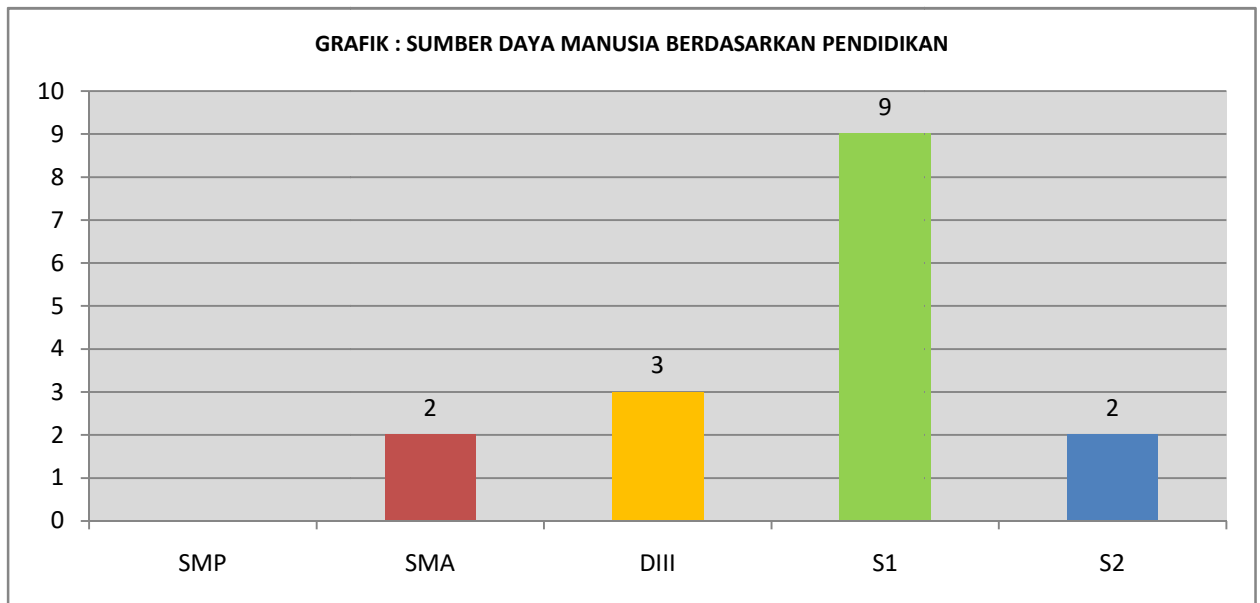
Grafik 1 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan.



Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

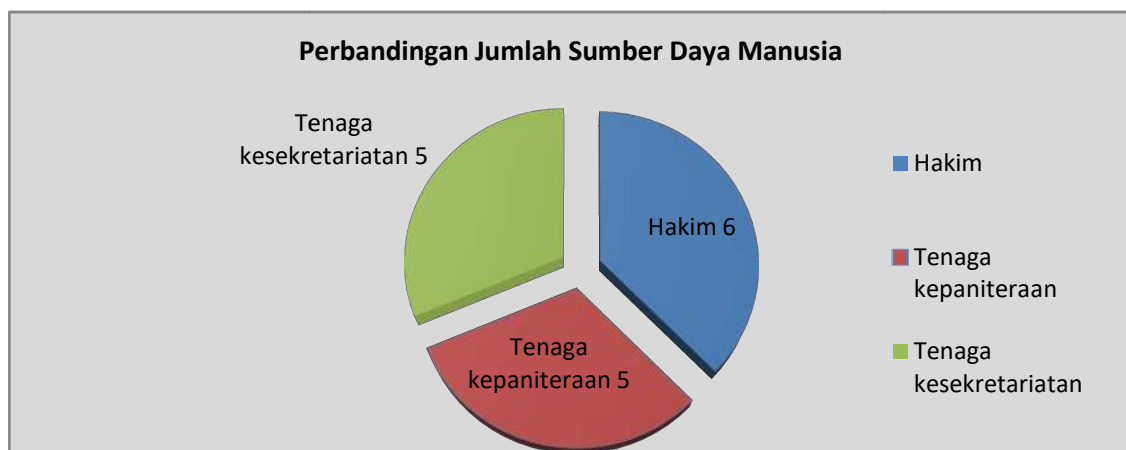
Grafik 2 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.



Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana

Berikut disajikan perbandingan Jumlah Hakim, Tenaga Kepaniteraan dan Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2021.

Grafik 3 : Perbandingan Jumlah Sumber daya Manusia berdasarkan Tenaga Teknis dan Non Teknis.



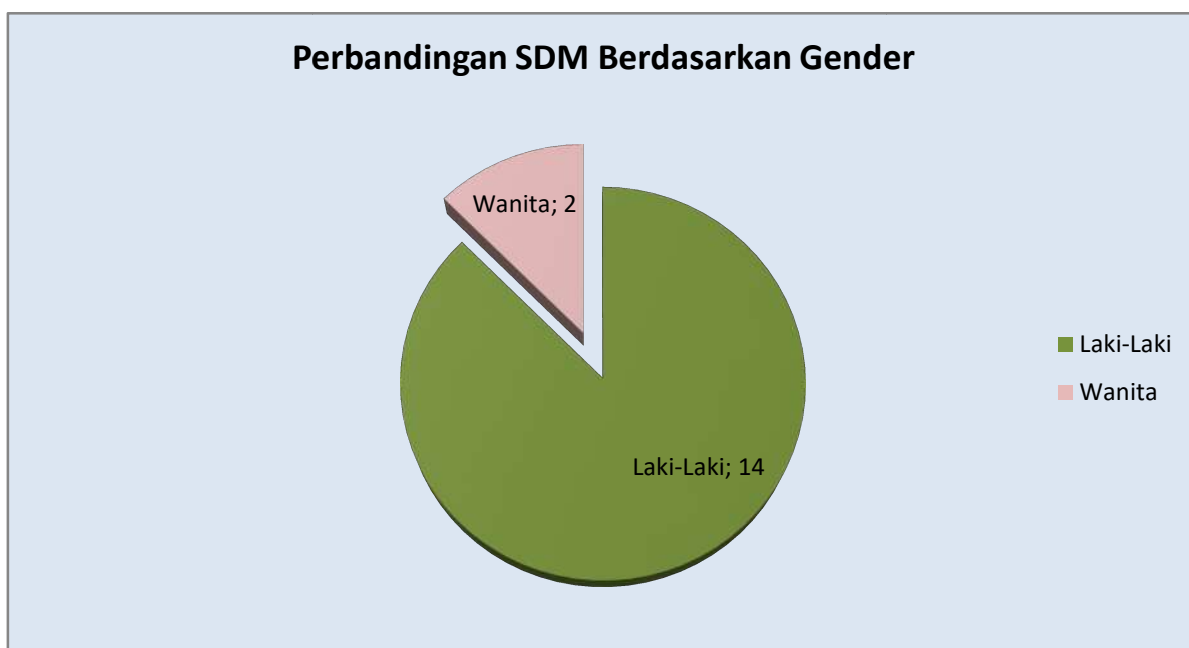
Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

keterangan :

Hakim : 6 personel

Tenaga kepaniteraan : 5 personel
 Tenaga kesekretariatan : 5 personel

Grafik 4 : Perbandingan Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Gender.



Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Selain Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dalam Pelaksanaan kegiatan sehari-hari perkantoran pada Pengadilan Negeri Sinabang juga dibantu oleh tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) berikut data personel tenaga kontrak di Lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2021

Tabel : Tenaga Kontrak (PPNPN)

No	Nama	Tugas	Keterangan
1.	Kasmadi	Pramubakti	
2.	Hairul Mardi	Satpam	
3.	Suhendi	Satpam	
4.	Dedi Ardiansyah, S.H.	Pramubakti	
5.	Harlita, S.H.	Pramubakti	
6.	Rofinul Ikhwani	Pramubakti	
7.	Aminsyah, S.E.	Pramubakti	

8.	Khairuddin	Pramubakti
9.	Mulia Raironta, S.Kom	Pramubakti
10.	Sahrul Amin	Supir
11.	Ahmad Jais	Supir
12.	Foni Alfira, S.Pd	Pramubakti

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- **MUTASI**

Pada tahun 2021 mutasi masuk dilingkungan Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

Tabel : Mutasi Masuk Tahun 2021

No	Nama	TMT	keterangan
1.	JAMALUDDIN, S.H., M.H.	7 Januari 2021	Mutasi dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2.	ALFAN PERDANA, SH	1 Februari 2021	Mutasi dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh
3.	MULIADI, A.Md	25 maret 2021	Intansi Luar

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

Pada tahun 2021 yang Pegawai mutasi keluar pada lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

Tabel : Mutasi Keluar Tahun 2021

No	Nama	Tanggal Mutasi	keterangan
1	MUHIFUDDIN, SH., MH	22 januari 2021	Mutasi ke Pengadilan Negeri Lhoksukon
2	RAHMAWAN, SH	28 Januari 2021	Mutasi ke Pengadilan Negeri Kuningan
3	LINGGA FEBRIYANTI, SH	16 Maret 2021	Mutasi ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- **PROMOSI**

Data promosi pada lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Promosi	Tanggal
1.	AYON AURIFAN, SH	Dari Panmud Pidana menjadi Panitera Pengadilan Negeri Sinabang	23 Juni 2021
2.	ANDI PRANOTO, SH	Dari Kasubag PTIP menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Sinabang	9 Juli 2021
3.	RONI	Dari Jurusita Penggati menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang	6 September 2021

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- **PENSIUN/MENGUNDURKAN DIRI**

Pegawai yang mengundurkan diri pada tahun 2021:

No	Nama	Tanggal	Keterangan
1	Adnan Fawwaz Hadju, SH	1 Februari 2021	Mengajukan pengunduran diri.

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

- **DIKLAT**

Untuk memenuhi standar pelayanan publik tersebut maka Mahkamah Agung melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan cara mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Sinabang untuk mengikuti Pelatihan dan Diklat yang berguna bagi peningkatan kualitas dan kemampuan kerja.

Berikut adalah daftar Pegawai pada Pengadilan Negeri Sinabang yang mengikuti Diklat dan Pelatihan pada tahun 2021 :

Tabel : Berikut Data Diklat sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2021

No	Nama Diklat	Jumlah SDM yang diikuti	Unit Kerja
1	Seminar Online Kerjasama dengan PPM dari Tempat Tugas Tahun 2021	2	Pengadilan Negeri Sinabang
2	Pelatihan Online Basic Video Production	1	Pengadilan Negeri Sinabang
3	Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta PKA Gel. I Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
4	Pelatihan Online Basic Motion Graphic with Adobe After Effect T.A 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
5	Pelatihan Online Basic 3D Mapping Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
6	Bimtek Pengisian Capaian Output dan Persiapan Implementasi SAKTI Module	1	Pengadilan Negeri Sinabang
7	Pelatihan Online Arsip Elektronik Angkatan II Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
8	Pelatihan Online English Effective Presentation bagi Peserta PKA Gel. 1 Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
9	Pelatihan Online Public Speaking and Effective Communication Skill	1	Pengadilan Negeri Sinabang
10	Pelatihan Online English Effective Presentation bagi Peserta PKP Gel. 1 Angkatan XVII s.d XXV Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
11	Pelatihan Online Basic Booklet Design With Adobe Indesign	1	Pengadilan Negeri Sinabang
12	Bimtek Pengembangan Kompetensi Pengelola Kepegawaian Tahun 2021	2	Pengadilan Negeri Sinabang
13	E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan V Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
14	Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja Gelombang II Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
15	E-Learning Penyegaran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM) Angkatan III Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
16	E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IX Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
17	Bimtek Peningkatan Kompetensi Manajemen dan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2021	2	Pengadilan Negeri Sinabang
18	Pelatihan Online Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
19	Bimtek dan Pengarahan Ketua PT Banda Aceh Bulan September Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang

20	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE) 1 Tahun 2021	1	Pengadilan Negeri Sinabang
21	Pelatihan Sosialisasi PERMA 5 Tahun 2019	2	Pengadilan Negeri Sinabang
22	Bimtek Pelaksanaan Eksekusi dan Konsinyasi pada Ketua Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum PT Banda Aceh	1	Pengadilan Negeri Sinabang

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana.

BAB . V PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan terdiri dari pengelolaan keuangan perkara dan pengelolaan keuangan DIPA, Berikut data Laporan Keuangan Perkara dan pengelolaan keuangan DIPA Tahun 2021

1. Keuangan Perkara

Berikut disajikan laporan keuangan perkara perdata periode januari – desember 2021

Tabel : Laporan Keuangan Perkara periode januari - Desember Tahun 2021

No	Nama jenis Penerimaan/pengeluaran	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Saldo Awal	5.471.520,-			
2.	Penerimaan		41.650.000,-		
3.	Pengeluaran			40.464.000,-	
	Jumlah	5.471.520,-	41.650.000,-	40.464.000,-	6.657.520,-

Sumber data : Kepaniteraan Muda Perdata

2. Laporan Keuangan DIPA

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh anggaran sebesar Rp. **3.405.894.000,-** DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan untuk anggaran DIPA 03 Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. **31.326.000,-**

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sinabang memperoleh penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai IKPA kategori sangat baik Lingkup KPPN Meulaboh periode semester II Tahun 2021.

TABEL : REALISASI ANGGARAN DIPA 01 PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2021

No	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.405.894.000,00	3.354.826.146,00	98,50	51.067.854,00	1,50
	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	2.016.502.000	2.014.649.559	99,91	1.852.441,00	0,09
	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1.351.892.000	1.303.136.587	96,39	48.755.413,00	3,61
	BELANJA MODAL	37.500.000	37.040.000	98,77	460.000,00	1,23

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

TABEL : REALISASI ANGGARAN DIPA 03 PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN
2021

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Dana	
			Rp.	%	Rp.	%
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	31.236.000,00	31.235.000,00	100,00	1.000,00	0,00
	Pos Bantuan Hukum	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	0,00	0,00
	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	12.036.000,00	12.035.000,00	99,99	1.000,00	0,01

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung kantor Pengadilan Negeri Sinabang dibangun di atas tanah seluas 7,322 m² dengan luas Bangunan Gedung Kantor . Pada halaman depan gedung kantor terdapat pos jaga seluas 6 m² dan tempat parkir kendaraan roda 4 (empat).

Gedung kantor Pengadilan Negeri Sinabang terdiri dari 2 (dua) lantai, dengan penataan ruangan-ruangan sebagai berikut :

a. Lantai 2

1. Ruang Kerja Ketua, dilengkapi dengan toilet dan AC;
2. Ruang Kerja Wakil Ketua, dilengkapi dengan toilet dan AC;
3. Ruang Kerja Hakim, dilengkapi dengan toilet dan AC;
4. Ruang Panitera,
5. Ruang Sekretaris
6. Ruang rapat;
7. Ruang Panitera Pengganti;

b. Lantai 1

1. Ruang Sidang Cakra,
2. Ruang sidang anak;
3. Ruang tahan dewasa
4. Ruang tahan anak;
5. Ruang Kepaniteraan Muda Pidana
6. Ruang Kepaniteraan Muda Perdata
7. Ruang Panitera Hukum;

8. Ruang Sub Bagian PTIP;
9. Ruang Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana;
10. Ruang Subbag Umum dan Keuangan;
11. Kamar Mandi Staf terdiri dari kamar mandi perempuan dan laki-laki yang terletak di sisi kiri dan kanan.
12. Ruang Jaksa;
13. Ruang Pos Pelayanan Hukum;
14. Ruang Pustaka;
15. Kamar Mandi Pengunjung Pria dan wanita yang terletak bagian di sisi kiri dan kanan.
16. Mushallah.
17. Ruang Tunggu pengunjung sidang.
18. Ruang Layanan Terpadu satu Pintu.

Tabel : Aset Tanah dan Bangunan.

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	7	Aset tanah telah bersertifikat seluruhnya An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Digunakan untuk gedung kantor
3.	Bangunan Rumah Dinas Tipe C	13	Digunakan untuk rumah dinas hakim dan pegawai

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sinabang antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada di Pengadilan Negeri Sinabang adalah :

Tabel : Sarana dan Prasarana Gedung.

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	

5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang Umum	1
7	Ruang Sidang Anak	1
8	Ruang Panmud	3
9	Ruang Kasubbag	3
10	Ruang IT/server	1
11	Ruang Jaksa	1
12	Ruang Mediasi/Diversi	1
13	Ruang Tahanan	4
14	Ruang Laktasi	1
15	Ruang Posbakum	1
16	Ruang Rapat	1
17	Ruang Arsip	1
18	Ruang Pustaka	1
19	Ruang Jurusita	1
20	Ruang Panitera Pengganti	1
Sarana/prasarana Fasilitas perkantoran kantor		
1	Computer	9 Baik
2	Laptop	6 Baik
3	Printer	12 Baik
4	Server	1 Baik
5	Reuter	1 Baik
6	Ac	12 Baik

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel : Kendaraan Dinas.

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
I	Jenis kendaran roda 4	4				
1	Toyota Innova (Luxury)	2014	1	-	-	DIPA Satker
2	Toyota Innova (seri E)	2006	-	1	-	DIPA Satker
3	New Avanza	2012	1	-	-	DIPA Satker
4	Daihatsu Taruna	2006	-	-	1	Hibah Pemda

					Kab. Simeulue
II	Jenis kendaraan Roda 2	1	-	1	-
1	Honda Astrea Grand	2006	-	-	1
2	Honda GLP Max	1996	-	-	1
3	Honda MCB	1996	-	-	1
4	Honda Supra x	2005	-	1	-
5	Honda Supra	2006	1	-	-
7	Honda Blade	2013	1	-	-
8	Honda Blade	2015	1	-	-

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Sinabang.

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
I	Rumah Dinas	13				
1	Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	1	-	
3	Rumah Dinas Hakim	9	-	9	-	
4	Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-	
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	1	-	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

- Implementasi E-court di Lingkungan Peradilan Umum.

Guna menunjang implementasi E-court Pengadilan Negeri Sinabang telah menyiapkan sarana dan prasarana berupa meja Layanan Ecourt berupa Pojok Layanan Ecourt, melakukan sosialisasi melalui media website dan akun resmi media sosial Pengadilan Negeri Sinabang.



Gambar : Website Sebagai Sarana Informasi Ecourt.

dan memberikan informasi ecourt melalui media sosial dan website Pengadilan Negeri Sinabang melakukan sosialisasi internal ecourt, kegiatan layanan ecourt tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang tentang Pengelolaan Meja Informasi dan Pojok Ecourt. Berikut disampaikan implementasi penerapan ecourt di Pengadilan Negeri Sinabang.

Tabel : Jumlah Perkara Masuk yang didaftarkan Melalui E-court tahun 2021.

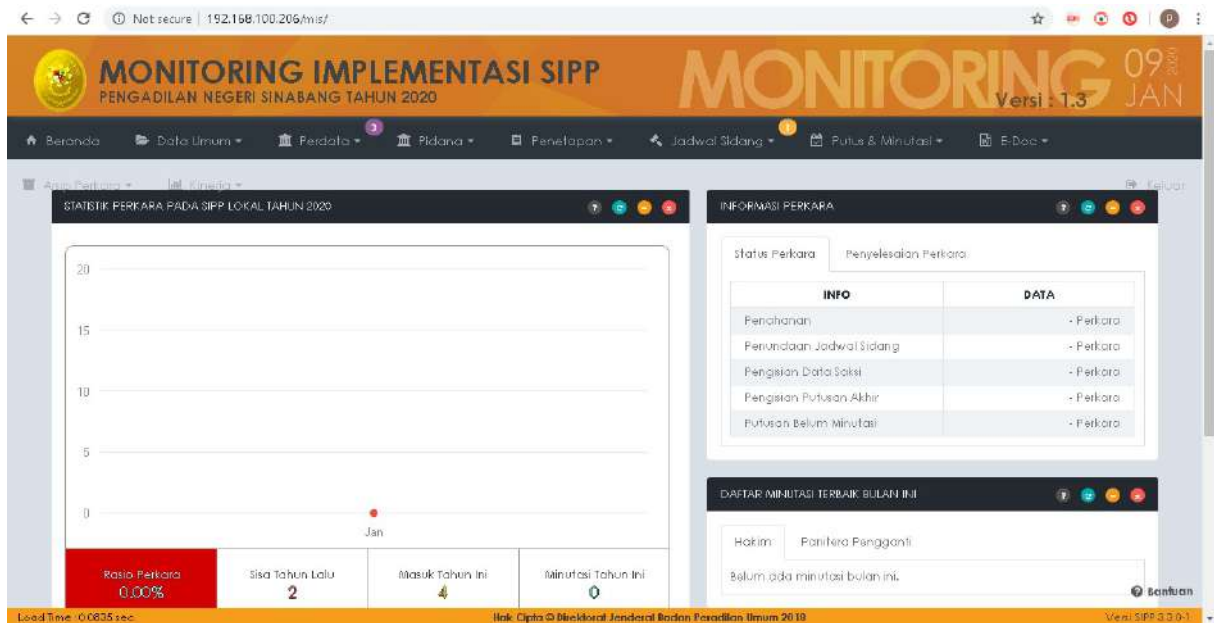
No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk yang didaftarkan melalui E-Court
1	Gugatan	2
2	Gugatan sederhana	2
3	Permohonan	5

- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.



Gambar : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP).



Gambar : Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP

Pada tahun 2021 bandwidth Internet 80 Mbps internet Dedicated demi meningkatkan konektivitas akses terhadap aplikasi / sistem berbasis elektronik yang ada di Mahkamah Agung RI termasuk SIPP. Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Sinabang adalah sebagai berikut :

**Tabel : Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya
Tahun 2021**

No	Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya									
		Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi	Kiosk
1	PN Sinabang	80 Mbps Internet Dedicated	2	12	9	15	8	1	1	1	1

Data tersebut merupakan perangkat IT yang dalam keadaan kondisi baik.



Gambar : Server Penunjang SIPP.

Bab. V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu.

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan mewujudkan performa / kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesian Court Performance Excellent – ICPE).

Pengadilan Negeri Sinabang pada tahun 2018 telah terakreditasi dengan nilai A “*excellent*”



Gambar : Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Adapun Tujuan Penerapan PTSP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Mempersingkat proses pelayanan.
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pengadilan Negeri Sinabang telah menerapkan PTSP beserta aplikasi PTSP-nya sehingga dapat menyederhanakan prosedur pelayanan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan diterapkannya PTSP.



Gambar : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Sinabang.

- Inovasi Pelayanan Publik.

Guna memberikan Pelayanan Publik yang Prima pengadilan Negeri Sinabang melakukan inovasi berupa Aplikasi Denda Tilang Berbasis Web dan Aplikasi OM Tampan yaitu aplikasi pengajuan Izin sita dan pengeledahan.

1. Aplikasi Informasi Tilang

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah para pelanggar lalu lintas mengetahui besaran denda tilang yang telah diputus oleh Pengadilan tanpa harus datang ke Pengadilan para pelanggar lalu lintas cukup mengakses alamat <http://tilang.pn-sinabang.go.id/> dari gadget yang terhubung dengan koneksi internet.



INFORMASI TILANG

Info Tilang No : D 0099292

Nama Pelanggar :
Bakrullah

No. Polisi :
172/PJL/2019/PV Sinb

No. Polisi :
BL 3012 TV

Barang Baku :
STNK

Tanggal Denda :
14-11-2019

Pidana Denda :
Pidana Denda Rp 49,000;
Bayar Pokok Rp 1,000;
Subsidi Kurang Rp 5,000

Kembali

* Penyelesaian denda dan pengurusan barang bukti dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Sinabang

Gambar : Aplikasi Informasi Tilang.



INFORMASI TILANG

* Ketik No. Tilang anda kemudian klik Info Tilang

No. Tilang

Info Tilang

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan klik [Info Tilang](#) anda dapat melakukan pencarian dengan memasukkan nama atau nomor polisi

© 2017 - Pengadilan Negeri Sinabang

Gambar : Aplikasi Informasi Tilang.

Aplikasi ini menindaklanjuti Tata cara sidang dan pembayaran denda tilang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Pasal 4 dijelaskan “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”.

2. Aplikasi OM Tampan.



Aplikasi ini adalah aplikasi yang berfungsi sebagai aplikasi pengajuan izin Penyitaan dan penggeledahan, dengan aplikasi ini pengajuan izin penyitaan dan penggeledahan lebih efisien pihak penyidik tidak perlu bolak balik kepengadilan untuk mendapatkan surat izin penggeledahan dan penyitaan, penyidik juga dapat memonitor proses penerbitan izin penggeledahan dan penyitaan melalui aplikasi OM Tampan.

Gambar Aplikasi OM Tampan

The screenshot shows the main interface of the OM-TAMPAN application. On the left is a dark sidebar with a menu containing "Dashboard", "Data User", "Pelayanan", and "Disposisi". The main content area has a header with the user's name "Administrator" and a "Keluar" (Logout) button. Below the header, there's a breadcrumb trail "Home / Izin Penyitaan" and a title "Permohonan Izin Penyitaan". There are three tabs: "Permohonan Diterima", "Permohonan Pending 1", and "Permohonan Ditolak". The "Permohonan Pending 1" tab is active. Below the tabs is a table titled "PERMOHONAN BELUM DIPROSES".

#	No. Register	Tgl. Register	No. Permohonan	Tgl. Permohonan	Status	Aksi
1	REG/IZ-PNYT/0000003	2021-01-08 10:53:43	B / 03 / 11 / Res. 4.2 / 2021	2021-01-08	Dalam Proses	Selesai

© 2020 - 2021 Online Manajemen Penyitaan dan Penggeledahan

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal.

Pengawasan yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Negeri Sinabang sendiri pengawasan telah dilakukan secara rutin dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor W1-U9/150/KP.04.11/2/2021 Tentang Hakim Pengawas.

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Sinabang dilakukan secara internal untuk kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi atas temuan internal tersebut.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.: KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan

untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya perkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

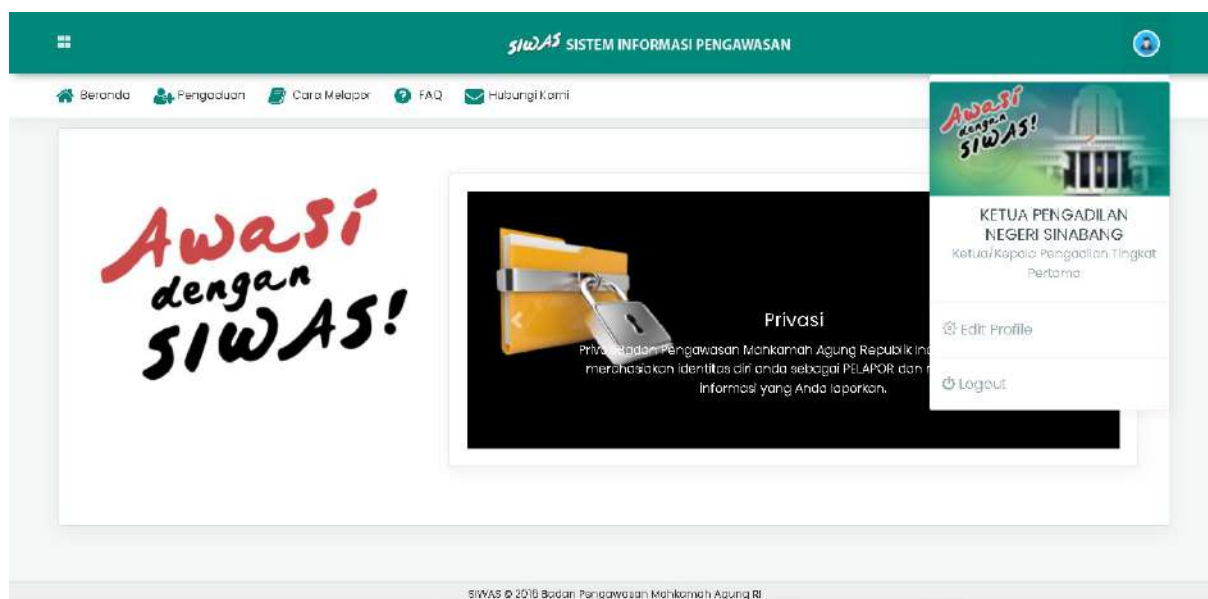
1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Negeri Sinabang, Nomor W1.U9/101/KP.04.11/1/2021 Tentang Hakim Pengawas, Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas
1	Alfan Perdana, SH	HAKIM	1. Subbag Kepegawaian dan Ortala; 2. Subbag PTIP.
2.	Muhammad Aditia, SH	HAKIM	Kepaniteraan Muda Perdata.
3.	M. Novansyah Merta, SH., M.Kn	HAKIM	Kepaniteraan Muda Hukum.
4.	Ahmad Galih Pratama, SH	HAKIM	Kepaniteraan Muda Pidana.
5.	Rezki Fauzi, SH	HAKIM	Subbag Umum dan Keuangan;

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik setiap bulan menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang.

Selain adanya pengawasan secara internal Pengadilan Negeri Sinabang juga menerima pengaduan melalui email, kotak pengaduan dan pengaduan melalui aplikasi SIWAS



B. MONITORING DAN EVALUASI

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua Pengadilan Negeri Sinabang secara rutin melaksanakan Apel setiap hari Senin Pagi dan hari Jum'at Sore serta melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sinabang melalui Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Sinabang.

Evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sinabang dengan sistem mengadakan rapat bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu ke-1, yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang.

BAB. VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Sinabang telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan pencari keadilan dengan memberikan layanan berupa kemudahan memperoleh informasi mengenai Pengadilan Negeri Sinabang melalui Website resmi Pengadilan Negeri Sinabang www.pn-sinabang.go.id, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai jadwal sidang, proses perkara melalui aplikasi penelusuran perkara dengan mengakses www.sipp.pn-sinabang.go.id, direktori putusan Pengadilan Negeri Sinabang, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta menyediakan pelayanan POSBAKUM bagi masyarakat.

B. REKOMENDASI

Pelayanan Pengadilan Negeri Sinabang terhambat oleh 3 (tiga) hal yaitu :

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil;
2. Kurangnya jaminan keamanan Kantor Pengadilan Negeri Sinabang, oleh karena belum adanya pagar sisi kiri, sisi kanan gedung kantor serta bagian belakang gedung kantor.
3. Sarana persidangan penunjang persidangan secara elektronik masih kurang memadai.

Untuk mengatasi hambatan tersebut di harapkan untuk segera adanya :

1. Penambahan jumlah pegawai, disertai system promosi dan mutasi berkala agar terjadi penyegaran pegawai.
2. Penambahan anggaran belanja modal peningkatan sarana dan prasarana.

Demikian Laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SINABANG**

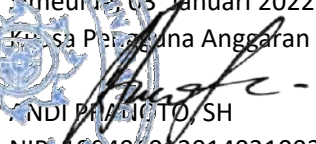
LAMPIRAN I
DAFTAR REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
DIPA 01

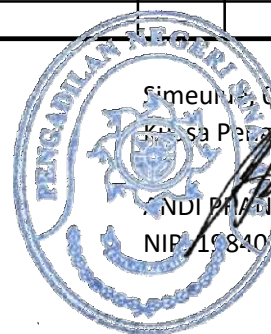
LAMPIRAN I
DAFTAR REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
DIPA 01

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

SATUAN KERJA : (098586) PENGADILAN NEGERI SINABANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	Kode Satker. Program. Keg.	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	005.01.0600.098586	PENGADILAN NEGERI SINABANG	3.391.594.000,00	3.033.442.594,00	89,44	321.383.552,00	9,48	3.354.826.146,00	98,92	36.767.854,00	1,08
1	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.391.594.000,00	3.033.442.594,00	89,44	321.383.552,00	9,48	3.354.826.146,00	98,92	36.767.854,00	1,08
	005.01.WA.1066	BELANJA PEGAWAI	2.016.502.000,00	1.856.704.884,00	92,08	157.944.675,00	7,83	2.014.649.559,00	99,91	1.852.441,00	0,09
	005.01.WA.1066(002)(A-Z)	BELANJA BARANG OPERASIONAL	1.332.592.000,00	1.134.697.710,00	85,15	163.438.877,00	12,26	1.298.136.587,00	97,41	34.455.413,00	2,59
	005.01.WA.1066(011-020)	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	005.01.WA.1071	BELANJA MODAL	37.500.000,00	37.040.000,00	98,77	0,00	0,00	37.040.000,00	98,77	460.000,00	1,23
	005.01.WA.1071.EAD	Layanan Sarana Internal (unit)	37.500.000,00	37.040.000,00	98,77	0,00	0,00	37.040.000,00	98,77	460.000,00	1,23

Simeulue, 03 Januari 2022
 Kepala Pelaksana Anggaran

 ANDI PRADIPTO SH
 NIP. 198401012014031002

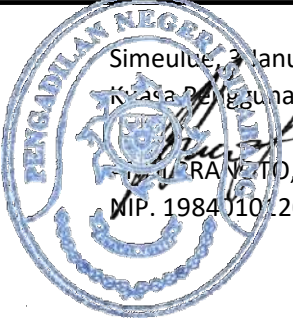


LAMPIRAN II
DAFTAR REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
DIPA 03

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

SATUAN KERJA : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Badan Peradilan Umum

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	005.03.0600.099186	PENGADILAN NEGERI SINABANG	31.326.000,00	28.125.000,00	89,78	3.200.000,00	10,22	31.325.000,00	100,00	1.000,00	0,00
1	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	31.326.000,00	28.125.000,00	89,78	3.200.000,00	10,22	31.325.000,00	100,00	1.000,00	0,00
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	31.326.000,00	28.125.000,00	89,78	3.200.000,00	10,22	31.325.000,00	100,00	1.000,00	0,00
	005.03.BF.1049(011-020)	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	31.326.000,00	28.125.000,00	89,78	3.200.000,00	10,22	31.325.000,00	100,00	1.000,00	0,00


 Simeulue, 3 Januari 2022
 Kepala Pengadilan
 RANVITO, SH
 MIP. 198411012014031002

LAMPIRAN III
PENGHARGAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH

Jalan Sisingamangaraja No.3 Meulaboh - 23617
Telepon : 0655-7551024, 7551271, Faksimile : 0655-7551023
Email : kppn.mbo@gmail.com Website : www.kppnmeulaboh.net

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH
NOMOR : KEP- **86** /WPB.01/KP.003/2021

TENTANG

APRESIASI SATUAN KERJA SANGAT BAIK PERIODE SEMESTER II TAHUN 2021
MITRA KERJA KPPN MEULABOH

- Menimbang : a. bahwa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja adalah realisasi anggaran dan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja mitra kerja KPPN Meulaboh, perlu diberikan penghargaan kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Meulaboh yang telah melaksanakan anggaran tahun 2021 dengan nilai IKPA sangat baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala KPPN Meulaboh tentang Penetapan Peringkat Satuan Kerja Sangat Baik Mitra Kerja KPPN Meulaboh secara periodik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH TENTANG PERINGKAT SATUAN KERJA SANGAT BAIK PERIODE SEMESTER II TAHUN 2021 MITRA KERJA KPPN MEULABOH.

PERTAMA : Menetapkan Satuan Kerja sebagaimana tercantum pada lajur 2 pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KPPN Meulaboh ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Desember 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
MEULABOH,



NIP 197409071999031001

Tembusan :

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

**SATUAN KERJA DENGAN NILAI IKPA KATEGORI SANGAT BAIK
LINGKUP KPPN MEULABOH
SEMESTER II TAHUN 2021**

No.	Satker	Kode Satker	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
Satuan Kerja Sangat Baik Kategori SATKER PAGU BESAR (Pagu diatas 6 Milyar), yaitu :			
1	POLRES NAGAN RAYA	665090	96,73
2	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH	525144	96,68
3	KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH BARAT	430643	95,93
Satuan Kerja Sangat Baik Kategori SATKER PAGU SEDANG (Pagu diatas 3 Milyar s.d. 6 Milyar), yaitu :			
1	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. ACEH BARAT	019738	97
2	PENGADILAN NEGERI SINABANG	098586	96,44
3	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN MEULABOH	412998	96,17
4	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. NAGAN RAYA	668486	96,13
5	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 ACEH BARAT KAB. ACEH BARAT	676303	95,88
6	KANTOR PERTANAHAN NAGAN RAYA DI PROP. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	667861	95,03

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
MEULABOH,



Kurniawan

NIP. 197409071999031001

LAMPIRAN IV
DAFTAR ASET SIMAK BMN

LAPORAN KONDISI BARANG
BAIK
Per Kamis, September 16, 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH
NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SINABANG
KODE UAKPB : 005.01.06.098586.000

Tanggal : 16-09-2021
Halaman : 1
Kode Lap. : LKBT- PKPB2

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
	Kode Barang	Nama Barang				
1	2	3	4	5	6	7
1	2 . 01 . 01 . 01 . 002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	M2	216	264,860,290
2			2		424	531,134,290
3			3		618	489,549,790
4			4		494	203,754,290
5			5		1,302	765,314,290
6			6		1,233	1,376,970,290
<i>Jumlah Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II</i>					4,287	3,631,583,240
1	2 . 01 . 01 . 04 . 001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	M2	6,973	8,688,906,290
<i>Jumlah Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</i>					6,973	8,688,906,290
1	3 . 05 . 01 . 04 . 001	Lemari Besi/metal	6	Buah	1	3,300,000
2			7		1	3,300,000
3			8		1	3,300,000
4			9		1	3,300,000
5			10		1	3,300,000
6			11		1	3,300,000
7			12		1	3,300,000
8			13		1	3,300,000
9			14		1	3,300,000
10			15		1	3,300,000
11			16		1	3,300,000
12			17		1	3,525,000
13			18		1	3,525,000
14			19		1	3,525,000
15			20		1	3,525,000
<i>Jumlah Lemari Besi/metal</i>					15	50,400,000
1	3 . 05 . 01 . 04 . 002	Lemari Kayu	3	Buah	1	3,850,000
2			4		1	5,000,000
3			5		1	5,000,000
4			6		1	5,000,000
5			7		1	5,000,000
<i>Jumlah Lemari Kayu</i>					5	23,850,000
1	3 . 05 . 01 . 04 . 003	Rak Besi	1	Buah	1	4,400,000
2			2		1	4,070,000
3			3		1	6,200,000
4			4		1	6,200,000
<i>Jumlah Rak Besi</i>					4	20,870,000
1	3 . 05 . 01 . 04 . 005	Filing Cabinet Besi	6	Buah	1	3,300,000
2			7		1	3,300,000
3			8		1	3,300,000
4			9		1	3,300,000
5			10		1	3,300,000
<i>Jumlah Filing Cabinet Besi</i>					5	16,500,000
1	3 . 05 . 01 . 04 . 024	Laci Box	1	Buah	1	2,200,000
2			2		1	2,200,000
3			3		1	2,200,000
<i>Jumlah Laci Box</i>					3	6,600,000

LAPORAN KONDISI BARANG
BAIK
Per Kamis, September 16, 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH
NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SINABANG
KODE UAKPB : 005.01.08.098586.000

Tanggal : 16-09-2021
Halaman : 2
Kode Lap. : LKBT- PKPB2

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
	Kode Barang	Nama Barang				
1	2	3	4	5	6	7
1	3 . 05 . 01 . 05 . 001	Tabung Pemadam Api	1	Buah	1	1,200,000
2			2		1	1,200,000
3			3		1	1,200,000
4			4		1	1,200,000
<i>Jumlah Tabung Pemadam Api</i>					4	4,800,000
1	3 . 05 . 01 . 05 . 007	Cctv - Camera Control Television System	1	Buah	1	10,000,000
<i>Jumlah Cctv - Camera Control Television System</i>					1	10,000,000
1	3 . 05 . 01 . 05 . 008	Papan Visual/papan Nama	5	Buah	1	550,000
2			6		1	550,000
3			7		1	550,000
4			8		1	550,000
5			9		1	550,000
6			10		1	550,000
<i>Jumlah Papan Visual/papan Nama</i>					6	3,300,000
1	3 . 05 . 01 . 05 . 017	Mesin Absensi	2	Buah	1	2,600,000
<i>Jumlah Mesin Absensi</i>					1	2,600,000
1	3 . 05 . 01 . 05 . 044	Mesin Laminating	1	Buah	1	1,200,000
<i>Jumlah Mesin Laminating</i>					1	1,200,000
1	3 . 05 . 01 . 05 . 048	Lcd Projector/infocus	1	Buah	1	8,000,000
<i>Jumlah Lcd Projector/infocus</i>					1	8,000,000
1	3 . 05 . 01 . 05 . 081	Papan Pengumuman	1	Buah	1	880,000
<i>Jumlah Papan Pengumuman</i>					1	880,000
1	3 . 05 . 01 . 05 . 999	Perkakas Kantor Lainnya	1		1	770,000
<i>Jumlah Perkakas Kantor Lainnya</i>					1	770,000
1	3 . 05 . 02 . 01 . 002	Meja Kerja Kayu	32	Buah	1	3,300,000
2			33		1	3,300,000
3			34		1	3,300,000
4			35		1	3,300,000
5			36		1	3,300,000
6			37		1	3,300,000
7			38		1	3,300,000
8			39		1	3,300,000
9			40		1	3,300,000
10			41		1	3,300,000
11			42		1	3,300,000
12			43		1	4,400,000
13			44		1	4,400,000
14			45		1	2,750,000
15			46		1	2,750,000
16			47		1	2,750,000
17			48		1	2,750,000
18			49		1	2,750,000
19			50		1	2,750,000
20			51		1	2,750,000
21			52		1	2,750,000
22			53		1	2,750,000

LAPORAN KONDISI BARANG
BAIK
Per Kamis, September 16, 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH
NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SINABANG
KODE UAKPB : 005.01.06.098586.000

Tanggal : 16-09-2021
Halaman : 3
Kode Lap.: LKBT- PKPB2

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
	Kode Barang	Nama Barang				
1	2	3	4	5	6	7
23	3 . 05 . 02 . 01 . 002	Meja Kerja Kayu	54	Buah	1	2,750,000
24			55		1	2,750,000
25			56		1	2,750,000
26			57		1	5,060,000
27			58		1	2,500,000
28			59		1	2,500,000
29			60		1	2,500,000
30			61		1	2,500,000
Jumlah Meja Kerja Kayu					30	93,160,000
1	3 . 05 . 02 . 01 . 003	Kursi Besi/metal	161	Buah	1	3,850,000
2			162		1	3,850,000
3			163		1	3,850,000
4			164		1	3,850,000
5			165		1	3,850,000
6			166		1	3,850,000
7			167		1	4,800,000
8			168		1	4,800,000
9			169		1	4,800,000
Jumlah Kursi Besi/metal					9	37,500,000
1	3 . 05 . 02 . 01 . 004	Kursi Kayu	1	Buah	1	6,600,000
2			2		1	6,600,000
3			3		1	4,950,000
4			4		1	4,950,000
5			5		1	4,950,000
6			6		1	4,950,000
7			7		1	2,750,000
8			8		1	2,750,000
9			9		1	2,750,000
10			10		1	2,750,000
11			11		1	2,750,000
12			12		1	2,750,000
13			13		1	2,200,000
14			14		1	2,200,000
15			15		1	2,200,000
Jumlah Kursi Kayu					15	56,100,000
1	3 . 05 . 02 . 01 . 005	Sice	12	Buah	1	8,250,000
2			13		1	8,250,000
3			14		1	8,250,000
Jumlah Sice					3	24,750,000
1	3 . 05 . 02 . 01 . 008	Meja Rapat	2	Buah	1	4,880,000
2			3		1	4,880,000
3			4		1	4,880,000
4			5		1	4,880,000
5			6		1	4,880,000
6			7		1	4,880,000
Jumlah Meja Rapat					6	29,280,000
1	3 . 05 . 02 . 01 . 010	Tempat Tidur Besi	13	Buah	1	1,500,000

LAPORAN KONDISI BARANG
BAIK
Per Kamis, September 16, 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH
NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SINABANG
KODE UAKPB : 005.01.06.098586.000

Tanggal : 16-09-2021
Halaman : 4
Kode Lap.: LKBT- PKPB2

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
	Kode Barang	Nama Barang				
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Tempat Tidur Besi					1	1,500,000
1	3 . 05 . 02 . 01 . 014	Meja Resepsionis	1	Buah	1	32,890,000
2			2		1	15,100,000
Jumlah Meja Resepsionis					2	47,990,000
1	3 . 05 . 02 . 02 . 001	Jam Mekanis	11	Buah	1	100,000
Jumlah Jam Mekanis					1	100,000
1	3 . 05 . 02 . 04 . 004	A.c. Split	10	Buah	1	6,000,000
2			11		1	6,000,000
3			12		1	4,800,000
4			13		1	4,000,000
5			14		1	4,000,000
6			15		1	4,000,000
7			16		1	4,000,000
8			17		1	4,000,000
9			18		1	4,000,000
10			19		1	7,000,000
11			20		1	7,000,000
12			21		1	7,000,000
13			22		1	7,000,000
14			23		1	7,000,000
15			24		1	7,000,000
Jumlah A.c. Split					15	82,800,000
1	3 . 05 . 02 . 06 . 008	Sound System	4	Buah	1	6,000,000
2			5		1	6,000,000
Jumlah Sound System					2	12,000,000
1	3 . 05 . 02 . 06 . 026	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	1	292,185
2			2		1	292,185
3			3		1	1,000,500
Jumlah Lambang Garuda Pancasila					3	1,584,870
1	3 . 05 . 02 . 06 . 030	Tiang Bendera	1	Buah	1	1,000,000
2			2		1	1,210,000
3			3		1	1,210,000
Jumlah Tiang Bendera					3	3,420,000
1	3 . 05 . 02 . 06 . 042	Lambang Instansi	2,805	Buah	1	4,455,000
Jumlah Lambang Instansi					1	4,455,000
1	3 . 05 . 02 . 06 . 058	Gordyin/kray	21	Buah	1	4,812,500
2			22		1	4,812,500
3			23		1	4,812,500
4			24		1	4,812,500
Jumlah Gordyin/kray					4	19,250,000
1	3 . 06 . 01 . 01 . 036	Microphone/wireless Mic	1	Buah	1	1,900,000
2			2		1	1,900,000
Jumlah Microphone/wireless Mic					2	3,800,000
1	3 . 06 . 01 . 01 . 048	Uninterruptible Power Supply (ups)	1	Buah	1	2,200,000
2			2		1	2,200,000
3			3		1	9,998,450

LAPORAN KONDISI BARANG
BAIK
Per Kamis, September 16, 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH
NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SINABANG
KODE UAKPB : 005.01.06.098586.000

Tanggal : 16-09-2021
Halaman : 5
Kode Lap. : LKBT- PKPB2

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
	Kode Barang	Nama Barang				
1	2	3	4	5	6	7
4	3 . 06 . 01 . 01 . 048	Uninterruptible Power Supply (ups)	4	Buah	1	9,998,450
5			5		1	2,534,000
6			6		1	2,534,000
7			7		1	2,534,000
8			8		1	2,534,000
<i>Jumlah Uninterruptible Power Supply (ups)</i>					8	34,532,900
1	3 . 06 . 01 . 01 . 091	Digital Led Running Text	1	Buah	1	9,000,000
<i>Jumlah Digital Led Running Text</i>					1	9,000,000
1	3 . 06 . 01 . 02 . 135	Lcd Monitor	1	Buah	1	6,700,000
<i>Jumlah Lcd Monitor</i>					1	6,700,000
1	3 . 06 . 02 . 01 . 010	Facsimile	1	Buah	1	1,341,995
<i>Jumlah Facsimile</i>					1	1,341,995
1	3 . 06 . 03 . 47 . 002	Genset	1	Buah	1	288,750,000
<i>Jumlah Genset</i>					1	288,750,000
1	3 . 07 . 01 . 01 . 127	Kursi Dorong	1	Buah	1	3,300,000
<i>Jumlah Kursi Dorong</i>					1	3,300,000
1	3 . 07 . 01 . 04 . 108	Kursi Zeis	1	Buah	1	3,300,000
2			2		1	3,300,000
3			3		1	3,300,000
4			4		1	3,300,000
5			5		1	3,300,000
6			6		1	5,500,000
7			7		1	5,500,000
8			8		1	1,980,000
9			9		1	1,980,000
10			10		1	1,980,000
11			11		1	1,980,000
12			12		1	1,980,000
13			13		1	1,320,000
14			14		1	1,320,000
15			15		1	1,320,000
16			16		1	1,320,000
17			17		1	1,320,000
18			18		1	1,320,000
19			19		1	1,320,000
20			20		1	1,500,000
21			21		1	1,500,000
22			22		1	1,500,000
23			23		1	1,500,000
24			24		1	1,500,000
25			25		1	1,500,000
26			26		1	1,500,000
27			27		1	1,500,000
28			28		1	1,500,000
29			29		1	1,500,000
30			30		1	1,500,000
31			31		1	1,500,000

LAPORAN KONDISI BARANG
BAIK
Per Kamis, September 16, 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH
NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SINABANG
KODE UAKPB : 005.01.06.098586.000

Tanggal : 16-09-2021
Halaman : 6
Kode Lap. : LKBT- PKPB2

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
	Kode Barang	Nama Barang				
1	2	3	4	5	6	7
32	3 . 07 . 01 . 04 . 108	Kursi Zels	32	Buah	1	1,500,000
33			33		1	1,500,000
34			34		1	1,500,000
35			35		1	1,500,000
36			36		1	1,500,000
<i>Jumlah Kursi Zels</i>					36	72,140,000
1	3 . 10 . 01 . 01 . 999	Komputer Jaringan Lainnya	1		1	17,840,000
<i>Jumlah Komputer Jaringan Lainnya</i>					1	17,840,000
1	3 . 10 . 01 . 02 . 001	P.c Unit	14	Buah	1	10,000,000
2			15		1	10,000,000
3			16		1	9,998,450
4			17		1	9,998,450
5			18		1	9,998,450
6			20		1	12,187,400
7			21		1	12,187,400
8			22		1	12,187,400
9			23		1	12,201,900
10			24		1	12,201,900
<i>Jumlah P.c Unit</i>					10	110,961,350
1	3 . 10 . 01 . 02 . 002	Lap Top	20	Buah	1	15,000,000
2			21		1	15,000,000
<i>Jumlah Lap Top</i>					2	30,000,000
1	3 . 10 . 01 . 02 . 003	Note Book	4	Buah	1	14,888,500
2			5		1	12,803,000
3			6		1	12,803,000
4			7		1	12,699,000
5			8		1	12,699,000
<i>Jumlah Note Book</i>					5	65,892,500
1	3 . 10 . 02 . 01 . 009	Serial Printer	15	Buah	1	2,100,000
2			16		1	2,100,000
<i>Jumlah Serial Printer</i>					2	4,200,000
1	3 . 10 . 02 . 03 . 003	Printer (peralatan Personal Komputer)	1	Buah	1	2,499,750
2			2		1	2,499,750
3			3		1	2,499,750
<i>Jumlah Printer (peralatan Personal Komputer)</i>					3	7,499,250
1	3 . 10 . 02 . 03 . 004	Scanner (peralatan Personal Komputer)	1	Buah	1	10,000,000
2			2		1	2,500,000
<i>Jumlah Scanner (peralatan Personal Komputer)</i>					2	12,500,000
1	3 . 10 . 02 . 04 . 001	Server	1	Buah	1	12,000,000
2			2		1	40,000,000
3			3		1	84,310,000
<i>Jumlah Server</i>					3	136,310,000
1	3 . 10 . 02 . 04 . 002	Router	1	Buah	1	10,000,000
2			2		1	2,800,000
<i>Jumlah Router</i>					2	12,800,000
1	3 . 10 . 02 . 04 . 014	Rak Server	1	Buah	1	9,866,590

LAPORAN KONDISI BARANG
BAIK
Per Kamis, September 16, 2021

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH SYARIAH ACEH
NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SINABANG
KODE UAKPB : 005.01.06.098586.000

Tanggal : 16-09-2021
Halaman : 7
Kode Lap.: LKBT- PKPB2

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
	Kode Barang	Nama Barang				
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jumlah Rak Server</i>					1	9,866,590
1	4 . 01 . 01 . 01 . 001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Unit	1	-364,666,600
<i>Jumlah Bangunan Gedung Kantor Permanen</i>					1	-364,666,600
1	4 . 01 . 01 . 32 . 001	Bangunan Tempat Parkir	1	Unit	1	20,000,000
<i>Jumlah Bangunan Tempat Parkir</i>					1	20,000,000
1	4 . 01 . 02 . 03 . 007	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	14	Unit	1	191,538,000
<i>Jumlah Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen</i>					1	191,538,000
1	6 . 01 . 01 . 01 . 001	Monografi	1	Buah	1	485,860
2			2		1	485,860
3			3		1	485,860
4			4		1	485,860
<i>Jumlah Monografi</i>					4	1,943,440
1	8 . 01 . 01 . 01 . 001	Software Komputer	1		1	4,900,600
<i>Jumlah Software Komputer</i>					1	4,900,600
1	8 . 01 . 01 . 01 . 999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1		1	4,900,600
<i>Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya</i>					1	4,900,600

Sinabang, Kamis, September 16, 2021
SEKRETARIS

ANDI PRANTO, SH
198401012014031002

LAMPIRAN V
SCREENSHOT TAMPILAN ECOURT DAN SIPP

**e - Court**
The Electronics Justice System

Pengadilan Negeri
Sinabang
(Administrator)

 Dashboard

 Pendaftaran Perkara ▾

 Pendaftaran Upaya Hukum ▾

 Konfigurasi Aplikasi ▾

 Pengguna Lain ▾

 F.A.Q

 Keluar

PDF | Print |   Pengadilan Negeri Sinabang ▾

Dashboard / Pendaftaran Perkara / Gugatan

Daftar Perkara di Pengadilan Anda

 Klik Nomor Register Pendaftaran untuk melihat detail Pendaftaran

Show 10 entries Search:

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN SNB-112021TRH 25 November 2021	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 31 Desember 2021	Rp. 385.000	6/Pdt.G/2021/PN Snb 25 November 2021
2	PN SNB-022021JI1 2 Februari 2021	Sudah Dibayar (Melakukan konfirmasi Pembayaran)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 19 Mei 2021	Rp. 1.550.000	1/Pdt.G/2021/PN Snb 3 Februari 2021
3	PN SNB-1120202ML 4 November 2020	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 5 April 2021	Rp. 516.000	3/Pdt.G/2020/PN Snb 5 November 2020
4	PN SNB-0820201ND 25 Agustus 2020	Sudah Dibayar (Melakukan konfirmasi Pembayaran)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 19 Juli 2021	Rp. 681.000	2/Pdt.G/2020/PN Snb 26 Agustus 2020



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SINABANG

Selamat Datang **Super Administrator**
Anda Login Sebagai **Super Administrator**

[Keluar](#)

[Edit Profile](#)

[Home](#) [Perdata Umum](#) [Perdata Khusus](#) [Pidana Umum](#) [Pidana Khusus](#) [Delegasi](#) [Laporan](#) [Jadwal Sidang](#) [Asip Perkara](#) [e-Court](#) [Antrian](#) [e-Payment](#) [Pesan](#) [Referensi](#) [System](#) [Help](#)

DAFTAR PERKARA GUGATAN

Total : 42

Ketik kata kunci

[Search](#)

[Search Detail](#)

[Cetak](#)

[Cetak Register Mediasi](#)

[Prev](#) [1](#) [Next](#)

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	3/Pdt.G/2020/PN Snb (e-Court)	05 Nov. 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1.Mandarusin 2.Nuraina 3.Nur Ihsani Tergugat: PT Rambayan Turut Tergugat: Pemerintah RI Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kakanwil Badan Pertanahan Aceh Cq Badan Pertanahan Nasional Simeulue	Persidangan	Persidangan	46 Hari	[detail]
2	2/Pdt.G/2020/PN Snb (e-Court)	26 Agu. 2020	Wanprestasi	Penggugat: Bupati Kabupaten Simeulue Tergugat: PT. Kasa Maganda dalam hal ini diwakili oleh Haji Sulaiman Ibrahim	Persidangan	Persidangan	104 Hari	[detail]
3	1/Pdt.G/2020/PN Snb (e-Court)	15 Jul. 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: DARWIS Bin DT SEMAUN Tergugat: ASNAWIYAH Turut Tergugat: 1.Pemerintah R.I. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Aceh Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simeulue	Putusan	Minutasi	72 Hari	[detail]

Load Time : 0.0254 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 4.41 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online | Version 4.0.1

LAMPIRAN VI

AKREDITASI



LAMPIRAN VII
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LAMPIRAN VIII
INOVASI PELAYANAN PUBLIK



INFORMASI TILANG

* Ketik No. Tilang anda kemudian click Info Tilang

No. Tilang

Info Tilang

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan klik [sops](#) anda dapat melakukan pencarian dengan menggunakan nama atau nomor polisi



Permohonan Izin Penyitaan

Permohonan Diterima

Permohonan Pending 1

Permohonan Ditolak

PERMOHONAN BELUM DIPROSES

#	No. Register	Tgl. Register	No. Permohonan	Tgl. Permohonan	Status	Aksi
1	REG/IZ-PNYT/0000003	2021-01-08 10:53:43	B / 03 / 11 / Res.4.2 / 2021	2021-01-08	Dalam Proses	Selesai

LAMPIRAN IX
SK HAKIM PENGAWAS BIDANG



KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
Nomor : W1-U9/150/PS/2/2021

TENTANG
REVISI PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN ANGGARAN 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG;

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 sebagaimana diubah untuk kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita;
 - b. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung RI telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
 - c. Bahwa tata cara pengawasandan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;
 - d. Bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi;
 - e. Bahwa karena adanya pertimbangan tentang mutasi para Hakim Pengawasan Bidang sehingga jabatan tersebut kosong, maka perlu ada penggantinya;
 - f. Bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Peradilan Umum;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/021/SK/III/1988 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/019/SK/VIII/1991 tentang Perubahan/Penyempurnaan Pola-Pola Register Perkara, Keuangan Perkara dan Laporan Perkara;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/003/SK/I/1993 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/003/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan evaluasi atas Hasil pengawasan oleh Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat Pertama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pimpinan Pengadilan dalam Melaksanakan Pengawasan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama tentang KMA/071/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG TENTANG REVISI PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN ANGGARAN 2021
- Pertama : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Tanggal 05 Mei 2020 Nomor W1-U9/399/PS/5/2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Sinabang tidak berlaku lagi;
- Kedua : Menunjuk kembali Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir surat keputusan ini;
- Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
NOMOR : W1-U9/150/PS/2/2021
TANGGAL : 01 Februari 2021

NO	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG DAN KOORDINATOR
1.	ALFAN PERDANA, S.H	HAKIM	- Koordinator Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana - Koordinator Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
2.	MUHAMMAD ADITIA, S.H	HAKIM	- Koordinator Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Perdata
3.	M. NOVANSYAH MERTA, S.H	HAKIM	- Koordinator Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Hukum
4.	AHMAD GHALI PRATAMA, S.H	HAKIM	- Koordinator Pengawas Bidang Kepaniteraan Muda Pidana
5.	REZKI FAUZI, S.H	HAKIM	- Koordinator Pengawas Bidang Umum dan Keuangan

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SINABANG,


JAMALUDDIN

LAMPIRAN X
SK TIM AUDIT INTERNAL



PENGADILAN NEGERI SINABANG

Jalan. Tgk Di Ujung No. 406 Sinabang – Kab. Simeulue, 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : www.pn-sinabang.go.id e-mail : pnsinabang@yahoo.com

SINABANG - KAB. SIMEULUE

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

NOMOR : W1-U9/1174/OT.00/10/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR (IA) AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG TAHUN 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya Internal Auditor (IA) pada Pengadilan Negeri Sinabang;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang memandang perlu menunjuk Tim Internal Auditor Akreditasi Pejaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Sinabang;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Internal Auditor pada Pengadilan Negeri Sinabang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR (IA)
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI
SINABANG TAHUN 2021.

KESATU Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini
untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Internal Auditor (IA) Akreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri
Sinabang.

KEDUA : Tim Internal Auditor Penjaminan Mutu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Jadwal dan Program Audit Internal;
2. Mempersiapkan semua berkas administrasi terkait audit internal;
3. Melakukan pemeriksaan/Audit yang objektif terhadap unit-unit
akreditasi;
4. Mencatat semua hasil temuan audit;
5. Membuat laporan hasil audit;
6. Melaksanakan rapat auditor internal untuk membahas kesimpulan
hasil audit.

KETIGA Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

**WAKILKETUA
PENGADILAN NEGERI SINABANG,**



Lampiran
Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang
Nomor :W1-U9/174/OT.00/10/2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

**TIM INTERNAL AUDITOR (IA)
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN PENGADILAN NEGERI SINABANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
INTERNAL SEKRETRIAT			
1.	Penanggung Jawab	JAMALUDDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua
2.	Koordinator Auditor	ALFAN PERDANA, S.H.	Hakim
TIM INTERNAL AUDITOR KEPANITERAAN			
1.	Ketua	ALFAN PERDANA, S.H.	Hakim
2.	Anggota	REZKI FAUZI, S.H	Hakim
TIM INTERNAL AUDITOR KESEKRETARIATAN			
1.	Ketua	MUHAMMAD ADITIA, S.H	Hakim
2.	Anggota	M. NOVANSYAH MERTA, S.H	Hakim
3.	Anggota	AHMAD GHALI PRATAMA, S.H	Hakim

Ditetapkan di : Sinabang
Pada tanggal : 18 Oktober 2021
**WAKILKETUA
PENGADILAN NEGERI SINABANG,**



LAMPIRAN XI
LAPORAN POSBAKUM

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN JANUARI TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
3	0	0	0	2	0	1	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	3	-

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sinabang



JAMALUDDIN

Simeulue, 29 Januari 2021

Plt. Panitera
Pengadilan Negeri Sinabang



AYON AURIFAN

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN FEBRUARI TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
2	1	0	0	3	0	0	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	3	-

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sinabang



JAMALUDDIN

Simeulue, 01 Maret 2021

Plt. Panitera
Pengadilan Negeri Sinabang



AYON AURIFAN

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN MARET TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
1	2	0	0	3	0	0	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	3	-

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sinabang



JAMALUDDIN

Simeulue, 01 April 2021

Plt. Panitera
Pengadilan Negeri Sinabang



AYON AURIFAN

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN APRIL TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

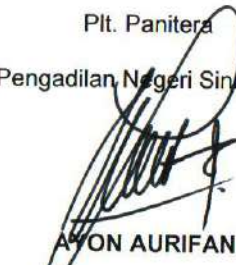
Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
2	1	0	0	3	0	0	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	3	-

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sinabang


JAMALUDDIN

Simeulue, 03 Mei 2021

Plt. Panitera
Pengadilan Negeri Sinabang


AYON AURIFAN

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN MEI TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
4	0	0	0	4	0	0	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	4	-

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sinabang



JAMALUDDIN

Simeulue, 01 juli 2021

Panitera
Pengadilan Negeri Sinabang



AYON AURIFAN

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN JUNI TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
3	0	0	0	3	0	0	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	3	-

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sinabang



JAMALUDDIN

Simeulue, 02 Juli 2021

Panitera
Pengadilan Negeri Sinabang



AYON AURIFAN

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN JULI TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
6	0	0	0	5	0	1	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	6	-

Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Sinabang



JAMALUDDIN

Simeulue, 02 Agustus 2021

Panitera
Pengadilan Negeri Sinabang

AYON AURIFANI

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN AGUSTUS TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
6	0	0	0	6	0	0	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	6	-

A.n. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Hakim

MUHAMMAD ADITIA
 ND Nomor : W1-U9/005/KP.04.06/8/2021
 Tanggal : 24 Agustus 2021

Simeulue, 01 September 2021

Panitera
 Pengadilan Negeri Sinabang


AYON AURIFAN

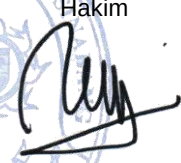
LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
9	2	0	0	11	0	0	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	6	-

A.n. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang

Hakim

M. NOVANSYAH MERTA
 ND Nomor : W1-U9/1062/KP.04.06/10/2021
 Tanggal : 01 Oktober 2021

Simeulue, 04 September 2021

Panitera

Pengadilan Negeri Sinabang


AYON AURIFAN

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN OKTOBER TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
4	0	0	0	3	0	1	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	4	-

Wakil-Ketua
Pengadilan Negeri Sinabang


JAMALUDDIN

Simeulue, 02 November 2021

Panitera
Pengadilan Negeri Sinabang


AYON AURIFAN

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN NOVEMBER TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
5	0	0	0	3	0	2	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	6	-

A.n. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



M. NOVANSYAH MERTA

ND Nomor : W1-U9/1234/KP.04.06/11/2021

Tanggal : 26 November 2021

Simeulue, 01 Desember 2021

Plh. Panitera

Pengadilan Negeri Sinabang

RONI

ND Nomor : W1-U9/1234/KP.04.06/11/2021

Tanggal : 26 November 2021

LAPORAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG

BULAN DESEMBER TAHUN 2021

Anggaran Posbakum Tahun 2021 : Rp. 19,200,000

Jenis Layanan			Pemohon Layanan				Advokat Piket	Waktu Layanan Dalam Jam	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan	Keterangan
Pemberian Informasi, Konsultasi Dan Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Penyediaan Informasi Organisasi Bantuan Hukum	Laki-laki		Perempuan		Lembaga / LBH / Perseorangan / Universitas				
			Difabel	Non Difabel	Difabel	Non Difabel					
4	0	0	0	4	0	0	Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Simeulue	16	Rp. 1.600.000	4	-

A.n. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang



M. NOVANSYAH MERTA
ND Nomor : W1-U9/02/KP.04.06/1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

Simeulue, 04 Januari 2022

Panitera
Pengadilan Negeri Sinabang

AYON AURIFAN